

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses sekuritisasi pemerintah Jerman terhadap krisis energi melalui kebijakan *Energiesicherungsgesetz* (EnSiG) periode 2022 sampai 2023 dengan menggunakan Teori Sekuritisasi dari Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde serta konsep keamanan energi dari Felix Ciută. Berdasarkan analisis terhadap dokumen resmi pemerintah, pidato politik, dokumen legislasi *Bundestag*, lima amandemen *Energiesicherungsgesetz* (EnSiG), serta data wawancara dari tiga narasumber WNI yang berada di Jerman selama periode krisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh tahapan sekuritisasi terbukti berlangsung secara nyata, berurutan, dan saling berkaitan. Pemerintah Jerman berhasil menjalankan fungsi *securitizing actor* yang diperkuat oleh aktor regional dan internasional, membingkai krisis energi sebagai ancaman eksistensial melalui *speech act* yang berlapis, mengonstruksikan *referent object* yang memiliki basis empiris kuat, memperoleh *audience acceptance* dari empat tingkatan audiens yang berbeda, serta melembagakan *extraordinary measures* melalui lima amandemen EnSiG yang mengubah fondasi tata kelola energi Jerman secara fundamental. Keberhasilan seluruh tahapan tersebut menjadikan kasus ini sebagai manifestasi empiris dari *legal securitization* yang berlangsung secara utuh, bertahap, dan dapat diverifikasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan energi Jerman pasca penghentian pasokan gas Rusia tidak dapat dipahami semata sebagai konsekuensi objektif dari krisis energi, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang secara aktif mengonstruksi energi sebagai isu keamanan sehingga memungkinkan negara memperluas kewenangannya melalui instrumen hukum. Temuan ini sejalan dengan perspektif Ciută (2010) bahwa keamanan energi merupakan hasil konstruksi politik, bukan kondisi yang hadir dengan sendirinya, sekaligus memperkuat argumen Szulecki (2020) bahwa sekuritisasi di sektor energi dapat berlangsung melalui pelembagaan hukum yang sistematis dan kumulatif. Dengan demikian, penelitian ini menjawab rumusan

masalah yang diajukan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keamanan non-tradisional dalam Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami bagaimana negara mengonstruksi ancaman energi sebagai isu keamanan dan melegitimasi tindakan luar biasa melalui instrumen perundang-undangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses sekuritisasi pemerintah Jerman terhadap krisis energi melalui *Energiesicherungsgesetz* (EnSiG) periode 2022 sampai 2023, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka ruang bagi pengembangan penelitian maupun pemanfaatan hasil penelitian dalam praktik perumusan kebijakan. Saran yang disampaikan dibedakan menjadi saran akademis dan saran praktis agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya keamanan energi, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan menghadapi ancaman non-tradisional.

6.2.1 Saran Akademis

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai sekuritisasi keamanan energi melalui pendekatan yang lebih luas, baik dari aspek teoritis maupun metodologis. Penelitian ini berfokus pada proses sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Jerman melalui analisis terhadap dokumen kebijakan, pidato resmi, proses legislasi *Energiesicherungsgesetz* (EnSiG) pada periode 2022 sampai 2023, serta wawancara dengan narasumber yang berada di Jerman selama periode krisis. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat memperluas analisis melalui studi komparatif dengan negara-negara Eropa lain yang menghadapi krisis energi serupa, seperti Italia, Belanda, atau Polandia, untuk melihat variasi proses sekuritisasi dalam konteks politik dan

kelembagaan yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengkaji lebih dalam peran aktor non-negara seperti perusahaan energi, media massa, organisasi internasional, maupun masyarakat sipil dalam membentuk *audience acceptance*, sehingga proses sekuritisasi tidak hanya dipahami sebagai interaksi antara pemerintah dan lembaga legislatif. Penelitian ini juga menemukan keterbatasan pada aspek *audience acceptance* yang dalam Teori Sekuritisasi asli Buzan et al. (1998) belum secara eksplisit mengakomodasi penerimaan audiens yang bersifat multilapis dan melibatkan aktor di luar negara, sehingga pengembangan kerangka teoritis mengenai konsep audiens dalam konteks keamanan non-tradisional menjadi agenda penelitian yang sangat relevan untuk dikembangkan lebih lanjut.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah maupun para pembuat kebijakan menjadikan pengalaman Jerman sebagai salah satu pembelajaran dalam merumuskan strategi keamanan energi ketika menghadapi krisis yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan krisis energi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan pasokan energi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun legitimasi politik melalui komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan didukung oleh kerangka hukum yang memadai. Bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya energi yang besar, temuan penelitian ini memberikan pelajaran penting bahwa kemandirian energi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan strategis yang memerlukan kerangka hukum yang kuat, koordinasi antar lembaga yang efektif, serta kemampuan membangun legitimasi publik atas kebijakan yang diambil. Negara-negara yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber energi eksternal perlu memperkuat diversifikasi sumber energi, meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengantisipasi gangguan

pasokan, serta menyiapkan instrumen hukum yang memungkinkan pengambilan kebijakan secara cepat tanpa mengesampingkan prinsip negara hukum dan mekanisme demokratis. Selain itu, koordinasi antar lembaga serta penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi, dan ketahanan nasional secara terpadu juga menjadi hal penting agar respons terhadap krisis tidak hanya mampu mengatasi kebutuhan jangka pendek, tetapi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.